

## MENINGKATKAN KESADARAN AKAN ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT LERENG MERAPI DESA CLUNTANG

Setyo Laras<sup>[1]</sup> dan Wisnu Sanjaya<sup>[2]</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

<sup>2)</sup>Dosen Teknik Informatika

Email : [Setyolaras18@gmail.com](mailto:Setyolaras18@gmail.com)

### ABSTRACT

*Over the past two years, the virus pandemic has changed the pattern of people's lives in various fields, including the economy and business, social, politics, education and technology. In the midst of the current pandemic, small, medium and large business actors must think hard in running their business. Since the issuance of the Village Law in 2014 (Law No.6), the government's commitment to encouraging fiscal decentralization through the realization of village funds has continued to this day. The impact of this policy has been felt by many people, starting from the improved facilities and infrastructure of roads, bridges, irrigation canals, building village markets, dams, drainage and others. Thus, the challenge of poverty is still quite high in the midst of massive development in rural areas, the biggest challenge at this time is the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic.*

*The agricultural economic sectors in the rural environment during this crisis era were able to survive as indicated by the village market which was still running even though the prices of agricultural products were unstable. Village markets are places where producers, traders, and buyers in an agrarian society gather for the purpose of not only economic exchange but also social and cultural interaction. Some come as suppliers, retailers, and buyers of goods and services to fulfill their daily needs.*

**Keyword :** *administration population, citizen's awareness, privacy identity*

### ABSTRAK

Selama dua tahun terakhir, pandemi virus telah mengubah pola kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan bisnis, sosial, politik, pendidikan dan teknologi. Ditengah pandemi saat ini, pelaku usaha baik kecil, menengah, dan besar harus berpikir keras dalam menjalankan usahanya. Sejak diterbitkannya UU Desa pada tahun 2014 (UU No.6), komitmen pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal melalui realisasi dana desa terus dilaksanakan hingga kini. Dampak kebijakan itu telah banyak dirasakan oleh masyarakat, mulai dari makin baiknya sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, bangunan pasar-pasar desa, embung, drainase dan lain-lain. Dengan demikian tantangan kemiskinan hingga kini masih cukup tinggi di tengah masifnya pembangunan di pedesaan, tantangan paling besar saat ini adalah krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Sektor-sektor ekonomi pertanian di lingkungan pedesaan pada era krisis ini tetap mampu bertahan yang ditunjukkan oleh pasar desa yang masih berjalan meskipun harga hasil pertanian tidak stabil. Pasar Desa adalah tempat produsen, pedagang, dan pembeli dalam lingkungan masyarakat agraris berkumpul untuk tujuan pertukaran tidak hanya ekonomi tetapi juga interaksi sosial dan budaya. Ada yang datang sebagai pemasok, penjual eceran, dan pembeli barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

**Kata Kunci :** administrasi kependudukan, kesadaran masyarakat, identitas pribadi

## PENDAHULUAN

Sistem administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menata dan menertibkan dokumen dan data kependudukan, melalui pencatatan kependudukan, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan database kependudukan baik bagi proses pelayanan masyarakat (publik) maupun bagi program-program pembangunan. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan adalah untuk kepastian hukum atas hak-hak sipil bagi warga negara, disamping sebagai upaya penyediaan informasi kependudukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Masyarakat daerah-daerah tertentu yang jauh dari kota masih minim banyak yang belum tau arti pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan surat ijin usaha bagi yang memiliki UMKM, salah satu diantaranya dalam memahami mekanisme, alur, dan teknis pengurusan. Rendahnya minat dan kesadaran warga desa dalam mengurus dokumen dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi surat itu sendiri. Minimnya informasi juga menunjukkan perilaku tidak disiplin dalam mengurus surat tersebut.

Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut terjadi karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dirasa kurang dan belum tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prasyarat pengurusan, fungsi, dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan.

Dengan ini sesuai dengan program kerja KKN Universitas Boyolali untuk mensosialisasikan kepada masyarakat arti pentingnya dokumen administrasi kependudukan bagi diri sendiri dan bagi negara. Agar masyarakat tertib dalam mengurus dokumen tersebut.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program KKN Universitas Boyolali 2022 dengan memberikan edukasi bagaimana arti pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan untuk kepentingan hak-hak sipil warga masyarakat sekitar. Pemberian edukasi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang belum memiliki Administrasi Kependudukan dengan metode memberikan pengetahuan secara langsung. Pemberian edukasi secara langsung kepada masyarakat yang berada di Dukuh Kaliwuluh Rt.003/Rw.001 Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, dengan bimbingan Dosen Pembimbing KKN Bapak Wisnu Sanjaya, S.Kom,M.kom.. KKN

dilaksanakan mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 8 Maret 2022. Dalam memberikan edukasi juga menggunakan metode komunikasi getok tular. Menurut saya (Setyo Laras) metode getok tular adalah yang paling memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mengancam dan bebas dari penularan virus. Untuk itu warga Dukuh Kaliwuluh Rt.003/Rw.001 Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali saat diberikan pengarahan bagaimana untuk mengurus Administrasi Kependudukan mereka sama-sama bisa terhindar dari bahaya covid-19 tersebut.

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

Tujuan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan adalah untuk kepastian hukum atas hak-hak sipil bagi warga negara, disamping sebagai upaya penyediaan informasi kependudukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, muthakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan administrasi kependudukan secara nasional terpadu, menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Edukasi secara langsung kepada masyarakat yang berada di Dukuh Kaliwuluh Rt.003/Rw.001 Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Dalam memberikan edukasi juga menggunakan metode komunikasi getok tular. Menurut saya (Setyo Laras) metode getok tular adalah yang paling memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mengancam dan bebas dari penularan virus. Untuk itu warga Dukuh Kaliwuluh Rt.003/Rw.001 Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali saat diberikan pengarahan bagaimana untuk mengurus Administrasi Kependudukan mereka sama-sama bisa terhindar dari bahaya covid-19 tersebut. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut membuat masyarakat lebih tau akan arti penting dari kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan.

### **KESIMPULAN**

Bahwa dengan adanya penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan untuk kegunaan diri sendiri atau kepentingan negara. Masyarakat juga dapat mengetahui fungsi, syarat kepengurusan, dan manfaat kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami panjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga segala sesuatunya diberikan kelancaran. Tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada Civitas Universitas Boyolali, Dosen Pembimbing Lapangan, Dukuh

Kaliwuluh Rt.003/Rw.001 Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Orang Tua yang selalu membantu dalam pelaksanaan program KKN ini, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun sehingga kegiatan KKN ini dapat terlaksana dan selesai dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Jimly Asshiddiqie, 2002, Administrasi Kependudukan Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Fatkhurrohman, , 2004, Dinamika Kependudukan dan Kebijakan, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

